

## Rekomendasi Kebijakan Perpajakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif di Indonesia

Ilham Febri Budiman  
Politeknik Keuangan Negara STAN

Correspondence		
Email: <a href="mailto:ilhamfebribudiman@gmail.com">ilhamfebribudiman@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted: 24 August 2024	Accepted: 3 September 2024	Published: 4 September 2024

**Abstrak:** Pertumbuhan ekonomi sejatinya harus berkualitas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Indonesia merupakan negara yang memiliki target pembangunan ekonomi yang inklusif. Beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain; pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5%; ketidakstabilan global; depresiasi rupiah; gini ratio; kemiskinan; potensi pajak yang belum dioptimalkan; tax ratio dibawah 15%; shadow economy; dan kualitas SDM yang masih rendah. Oleh karena itu, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan sektor perpajakan. Framework dari kebijakan ini terdiri dari tiga agenda yakni; regulation, incentive, dan distribution. Agenda distribution terdiri dari retribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Agenda regulation berisi peningkatan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agenda incentive berupa pembelian tax holiday pada sektor inklusif.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Inklusif, Perpajakan

*Abstract: Economic growth should be of high quality to achieve inclusive economic development. Indonesia is a country that has an inclusive economic development target. Some of the problems related to economic development in Indonesia include: stagnant economic growth at 5%; global instability; rupiah depreciation; gini ratio; poverty; unoptimised tax potential; tax ratio below 15%; shadow economy; and low quality of human resources. Therefore, policy recommendations for the taxation sector were formulated. The framework of this policy consists of three agendas namely; regulation, incentive, and distribution. The distribution agenda consists of revenue retribution and equitable development. The regulation agenda contains increasing taxpayers, expanding the tax base, and improving transparency and accountability. The incentive agenda is the purchase of tax holidays in inclusive sectors.*

**Keywords:** Economic Growth, Economic Development, Inclusive, Taxation

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global 2024 masih dibawah tren jangka panjang karena ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan data (IMF, 2024) diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 3,1 % pada tahun 2024 dan 3,2 % pada tahun 2025. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,2 % pada tahun 2024 atau turun 0,1 % dari tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri perekonomian tumbuh 5,11 % yoy pada triwulan I tahun ini (BPS, 2024). Angka tersebut lebih tinggi ketimbang pertumbuhan pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 5,05 %.

Berdasarkan data BPS, nilai perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 20.892,4 triliun pada 2023. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 bergantung pada sektor industri pengolahan. Terbukti, berdasarkan data (Databoks, 2024) terhitung Rp 3.900,1 triliun disumbang oleh sektor industri pengolahan atau berkontribusi sebesar 18,67 % terhadap PDB. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan yang menjadi ujung tombak perekonomian nasional mengalami tren penurunan yang mulanya mencapai 6,28 % pada 2011 turun menjadi 3,80 % pada tahun 2019 (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2022).

Indonesia sendiri terjebak dalam ekonomi eksklusif yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada sektor industri manufaktur dan jasa. Hal tersebut menyebabkan sektor primer seperti pertanian kurang mendapatkan perhatian. Padahal sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antara yang bekerja di sektor pertanian dengan sektor industri. Secara umum, banyak ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini disebabkan karena PDB kurang memerhatikan persoalan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya dilihat dari segi presentase kuantitasnya, tetapi juga dari segi kualitasnya. Menurut (Prasetyo, 2008) pertumbuhan ekonomi berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah sejatinya telah mengupayakan hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yakni mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Didukung pula dengan *triple track strategy* yakni *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*.

Pemerintah sejatinya perlu merancang kebijakan fiskal untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kebijakan fiskal yang dibutuhkan merujuk pada kebijakan keuangan negara dalam hal ini peran pemerintah sebagai pengelola keuangan negara. Menurut (Musgrave & Musgrave, 1989) terdapat 3 fungsi utama dari kebijakan fiskal, antara lain alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Di Indonesia sendiri, ketiga fungsi tersebut digunakan sebagai landasan pelaksanaan keuangan negara atau secara sempit dikenal dengan APBN. Oleh karena itu, APBN menjadi instrumen utama untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.

Tabel Presentase Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Total

Tahun	Penerimaan Total	Penerimaan Pajak	Presentase
2019	1.960,6 T	1.546,1 T	78,9 %
2020	1.647,7 T	1.285,1 T	78 %
2021	2.011,3 T	1.547,8 T	76,9 %
2022	2.635,8 T	2.034,5 T	77,1 %
2023	2.774,3 T	2.155,4 T	77,7 %

Sumber: Porta Data Kemenkau, Diolah Penulis

Berdasarkan data diatas, dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak berkontribusi lebih dari 77 % kepada penerimaan total tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan korelasi antara penerimaan sektor pajak dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

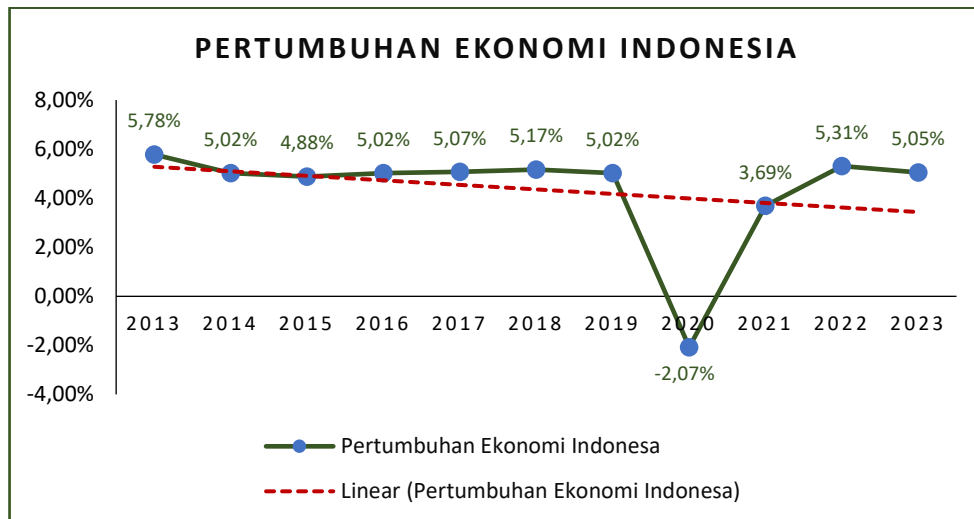
## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis deskriptif dengan pengumpulan data secara studi literatur. Studi pustaka atau dikenal juga dengan studi literatur menurut George dalam (dalam Budiman, 2024) ialah sebuah proses pencarian dari sumber-sumber atau opini para pakar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan indera manusia sebagai alat utama (Matthew & Ross, 2010). Artikel ini disusun dengan cara menganalisis masalah-masalah sosial terkait ekonomi dan perpajakan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian masalah disajikan dengan data-data yang valid dari sumber resmi pemerintah, instansi resmi, organisasi dunia, dan sebagainya dengan metode studi literatur dan disajikan melalui analisis deskriptif.

## ISI DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Masalah

#### a) Pertumbuhan Ekonomi

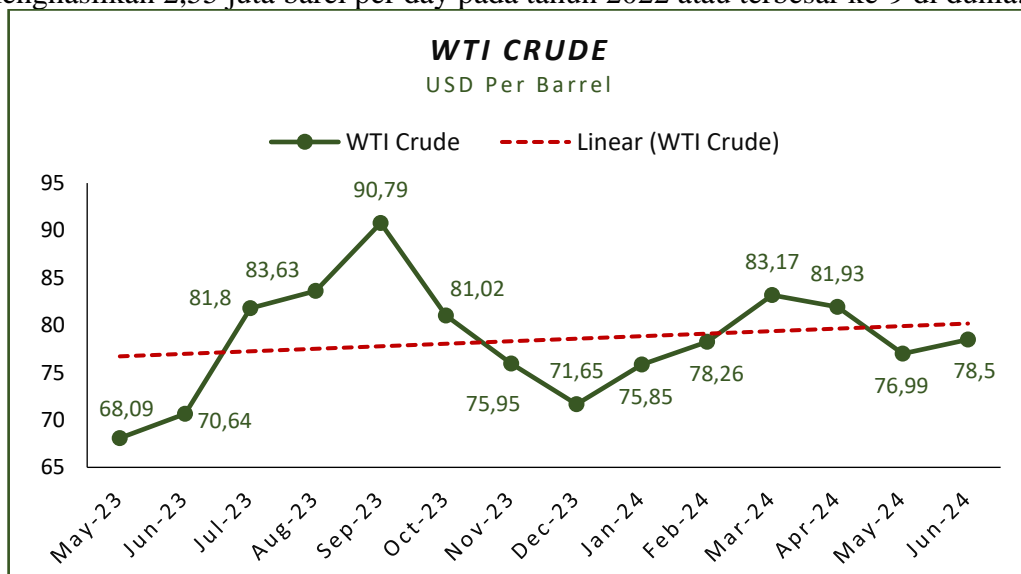


Sumber: BPS

PDB Indonesia hanya menempati posisi 16 dunia. Dalam Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan berada pada 5 besar negara dengan PDB terbesar di dunia. Deputi Makro dan Keuangan Kemenko, Iskandar Simonangkir juga mengatakan untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 7% tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat eksklusif yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada sektor industri manufaktur dan jasa. Hal tersebut menyebabkan sektor primer seperti pertanian kurang mendapatkan perhatian. Padahal sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antaran yang bekerja di sektor pertanian dengan sektor industri.

b) Ketidakstabilan Global

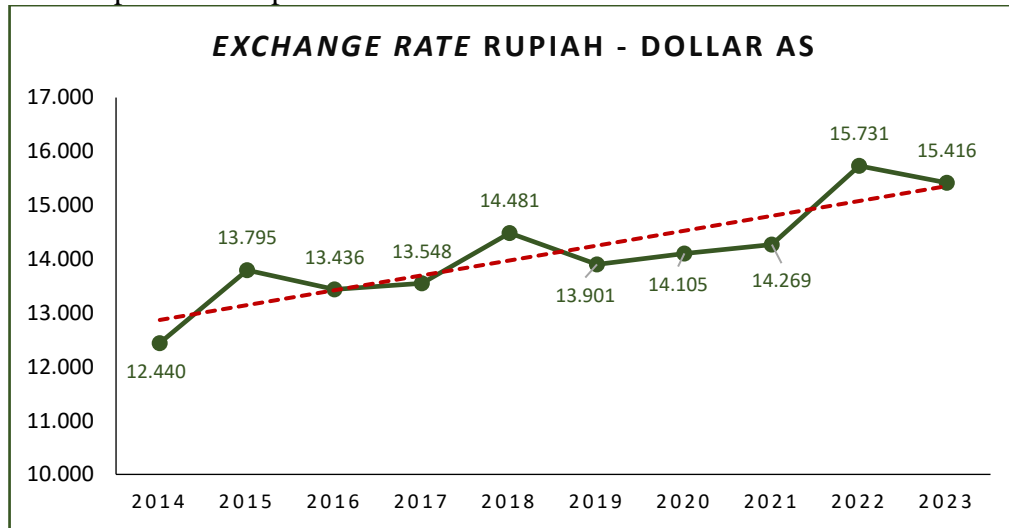
Konflik yang terjadi antara dua negara yakni Israel-Palestina dan Israel-Iran dapat berdampak pada perekonomian global dan nasional. Menurut (IMF, 2023), konflik yang terjadi dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Terkini, konflik yang terjadi antara Israel dan Iran berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak bumi. Hal ini karena Iran merupakan salah produsen minyak bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data OPEC, Iran menghasilkan 2,55 juta barel per day pada tahun 2022 atau terbesar ke-9 di dunia.



Sumber: Statista

Kondisi tingginya harga minyak bumi global berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Hal ini terjadi karena Indonesia masih mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan minyak bumi dalam negeri. Berdasarkan data (BPS, 2024) impor minyak mentah Indonesia berada pada angka 17,8 juta ton dan 27,3 juta ton hasil minyak per tahun 2023. Hal ini menyebabkan bengkaknya belanja subsidi pemerintah untuk hasil minyak bumi. Terlebih juga dengan kondisi nilai kurs rupiah yang lemah.

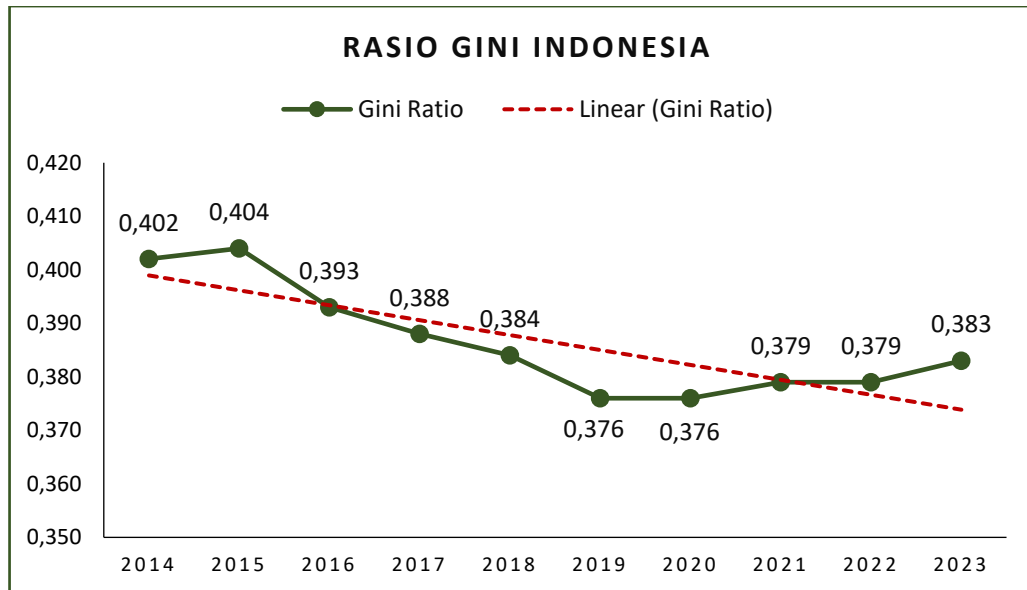
c) Depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS



Sumber: BPS

Berdasarkan grafik diatas, dalam jangka panjang (tren) nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS cenderung melemah. Dimana mulanya Rp12.440 pada tahun 2012 kini menjadi 15.416 pada tahun lalu. Pada Rabu (12/6/2024), rupiah ditutup di level Rp 16.297 per dollar AS atau melemah 5,26 persen dibandingkan penutupan akhir 2023. Nilai tersebut juga merupakan kurs rupiah terlemah sepanjang tahun berjalan 2024. Kondisi tersebut lebih cenderung disebabkan oleh rentetan permasalahan eskternal seperti konflik Iran – Israel pada beberapa waktu yang lalu. Tingginya suku bunga acuan di AS juga menjadi penyebab pelemahan nilai rupiah. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan global mempengaruhi nilai tukar rupiah. Apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Begitupula sebaliknya, yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan (Sianipar, 2019).

d) Gini Ratio

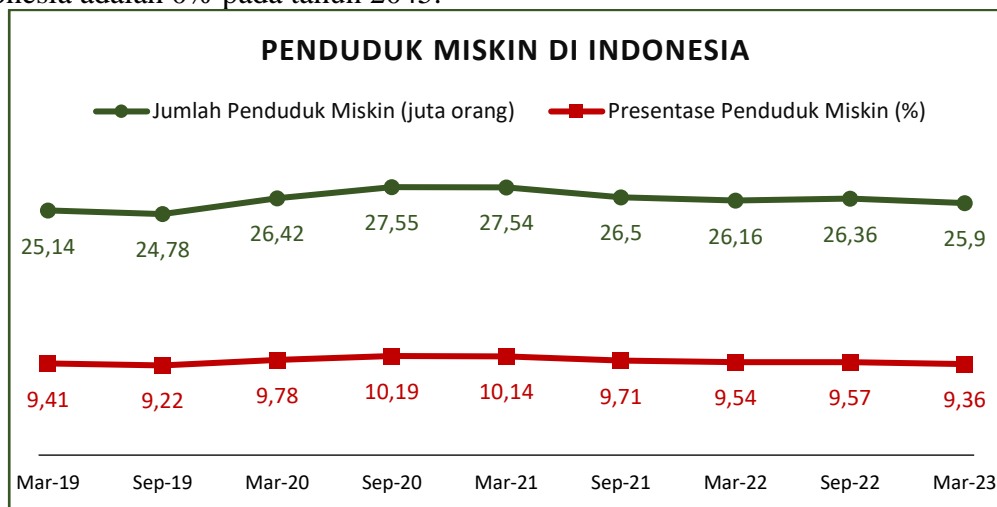


Sumber: World Bank

Beberapa tahun belakangan rasio gini kembali meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena ditakutkan bahwa kedepannya rasio gini akan meningkat bukannya menurun. Meskipun demikian, tren menunjukkan perubahan rasio gini Indonesia dari awalnya tahun 2014 dengan tingkat ketimpangan sedang (0,4 – 0,5) kini turun menjadi tingkat ketimpangan rendah (<0,4). Berdasarkan data BPS, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah hanya sebesar 18,04 %.

e) Kemiskinan

Kemisikinan merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pengentasan kemiskinan juga menjadi indikator tujuan dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu juga, merujuk pada RPJPN 2025-2045 target kemiskinan di Indonesia adalah 0% pada tahun 2045.



Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan di angka 9% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai angka 25,90 juta orang. Angka tersebut

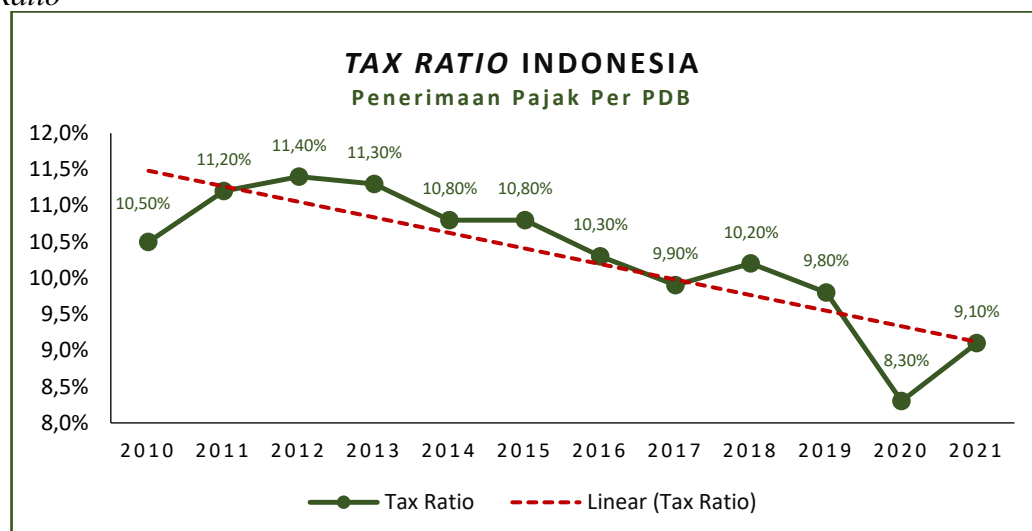


menurun sebesar 0,46 juta dari bulan September 2022. Wilayah Papua dan Maluku dengan presentase penduduk miskin terbesar di Indonesia yakni sebesar 19,68 %. Sementara itu, pulau Kalimantan menjadi daerah dengan presentase penduduk miskin terendah yakni hanya sebesar 5,67%.

f) Potensi Pajak

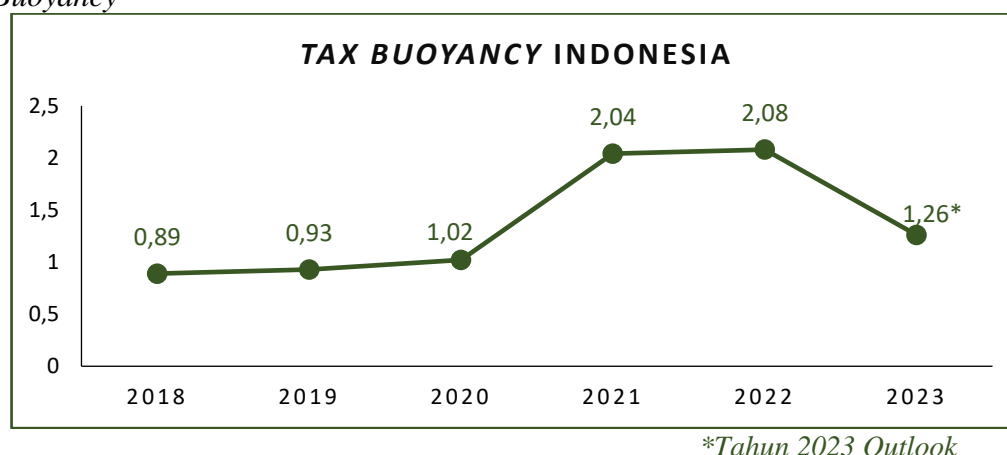
Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap PDB pada 2023, yaitu sebesar 13,57% terhadap PDB (Rp2.835 triliun). Selain sifat pertanian subsisten yang berfokus pada pemenuhan penghidupan petani dan juga mengabaikan peran komersial, tingginya tingkat informalitas juga menjadi bahan kontroversi. Mayoritas petani beroperasi secara mandiri tanpa registrasi usaha formal, sehingga menyulitkan pemerintah melacak pendapatan untuk keperluan perpajakan. Sebagian besar pelaku ekonomi di sektor ini belum menjadi wajib pajak aktif. Hal ini karena penghasilan yang didapatkan lebih kecil dari penghasilan tak kena pajak (PTKP). Oleh karena itu, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB sebesar 12,8%, tetapi beban pajaknya hanya 1,9% dari total penerimaan pajak.

g) Tax Ratio



Sumber: IFTAA

Berdasarkan data dari IFTAA, *tax ratio* Indonesia dalam kurun satu dekade terakhir, menunjukkan kecenderungan yang naik turun (fluktuatif). Angka *Tax Ratio* Indonesia apabila dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara masih tergolong rendah. Rata-rata *tax ratio* di Asia Tenggara pada 2022 mencapai 10,75%. Pada saat itu, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 10,4% saja. Persentase ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena belum mencapai minimal *tax ratio* yang ditargetkan oleh World Bank, yaitu minimal 15%.

h) *Tax Buoyancy*

Sumber: Kemenkeu dalam Ortax

*Tax Buoyancy* adalah indikator penerimaan pajak suatu negara yang mendefinisikan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penerimaan pajak negara. Rasio yang digunakan apabila  $<1$  maka kinerja penerimaan pajak kurang baik dan apabila  $>1$  maka kinerja pajak tergolong baik. Di Indonesia sendiri awalnya *Tax Buoyancy* dibawah 1 pada periode sebelum tahun 2020 atau sebelum Covid-19. Namun setelahnya, terjadi peningkatan bahkan hingga mencapai 2 poin. Masalah timbul ketika outlook tahun 2023 menurun tajam sebesar 0,82 poin ke angka 1,26. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan perpajakan yang mulai mendekati angka pertumbuhan ekonomi.

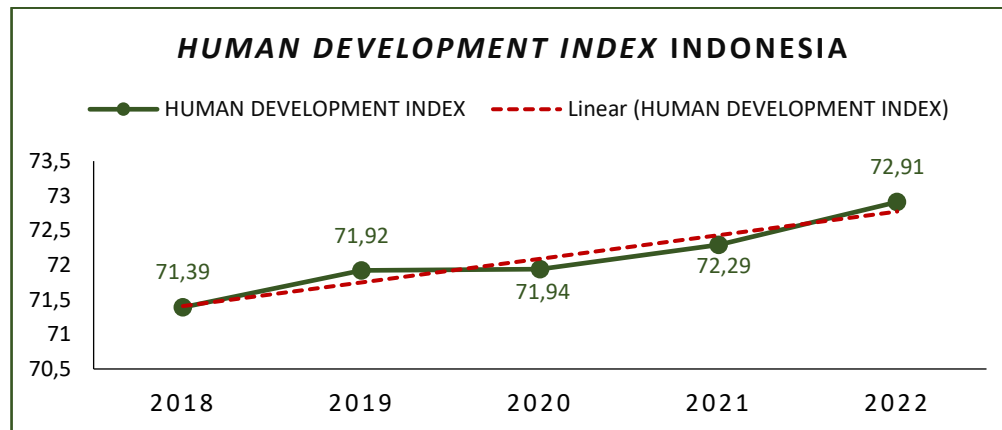
i) *Shadow Economy*

Ekonomi bayangan adalah sektor yang tidak tercatat dan tidak dikenakan pajak. Kemnaker mencatat sekitar 80 juta orang (60%) akan bekerja di sektor informal pada tahun 2022. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa sebanyak 83,34 juta orang (60,12%) akan bekerja di sektor informal pada tahun 2023, sementara hanya 55,29 juta orang (39,88%) yang akan bekerja di sektor formal. Seperti halnya simalakama, sektor informal di satu sisi dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi di sisi lain dampaknya yang paling nyata adalah hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya dipungut negara.

Kegiatan pada perekonomian informal dapat menurunkan jumlah penghasilan kena pajak dan berdampak pada berkurangnya basis pajak. Di Indonesia, perekonomian bayangan berjumlah 8-10% PDB. Jika PDB Indonesia tahun 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, maka yang tidak diperhitungkan sebesar Rp 2.089 triliun. Dengan asumsi 10% aktivitas shadow economy bisa dikenakan pajak, maka potensi kerugian penerimaan pajak mencapai Rp 208 triliun setiap tahunnya.

## j) Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM di suatu negara diukur dengan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu instrumen dari IPM adalah pendidikan. Penelitian dengan skala mikro di DKI Jakarta yang dilakukan oleh (Susanto & Pangesti, 2019) yang menyimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Hasilnya, semakin rendah tingkat pendidikan akan menyebabkan semakin tinggi kemiskinan dan berlaku sebaliknya. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendidikan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan seperti pada penelitian oleh (Firmansyah & Khairunnisa, 2023).



Sumber: Databoks Katadata

IPM Indonesia tergolong rendah yakni hanya sebesar 72,91. Indonesia berada pada peringkat 112 dunia untuk IPM (UNDP, 2023). Berdasarkan data (Databoks Katadata, 2024), Indonesia hanya berada pada peringkat 6 di kawasan ASEAN dan kalah negara-negara seperti dari Singapura (0,95), Brunei (0,82), Malaysia (0,81), Thailand (0,8) dan Vietnam (0,73). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara lain.

## Rekomendasi Kebijakan

### Agenda 1: Regulation

#### 1) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan Indonesia. Strategi yang perlu dijalankan adalah menggalakan sosialisasi melalui media sosial. Mengingat saat ini, hampir semua penduduk bermain media sosial. Selain itu juga, rekomendasi strategi yang dapat penulis berikan adalah ajakan atau himbauan pajak oleh influencer dan artis. Sehingga mereka dapat dijadikan role model dalam rangka kepatuhan melaporkan dan membayar pajak.

#### 2) Perluasan Basis

Di sektor informal, tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta pengelolaan pekerja yang tidak baik sehingga menyulitkan pemotongan pajak atas penghasilan pekerja. Ketentuan Pasal pada akhirnya mengakibatkan tidak ada pajak yang dipungut, dan ini harus menjadi undang-undang negara bagian. Oleh karena itu, kehadiran pekerja di sektor informal berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dan PPh. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerintah harus memfasilitasi transisi pelaku ekonomi dari sektor informal ke sektor formal. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa sektor ekonomi informal, khususnya usaha kecil, mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi dan penerimaan negara, peran ini dapat menjadi lebih besar jika statusnya diformalkan. Setelah itu, maka pajak yang dipungut dalam hal ini PPh akan meningkat.

#### 3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia harus dilakukan. Hal ini dapat membuat wajib pajak dan penduduk Indonesia memiliki rasa percaya kepada pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Akhirnya, mereka akan dengan suka rela melaporkan dan menyetorkan pajak sehingga kepatuhan akan meningkat pula.

### Agenda 2: Incentive

#### 1) Sektor Pendidikan

Pemberikan *tax holiday* pada sektor pendidikan yang merupakan salah satu kunci pembangunan ekonomi inklusif. *Tax holiday* dapat diberikan kepada lembaga bimbingan belajar, lembaga kursus dan pelatihan, serta sektor pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui insentif atau bahkan pembebasan PPh dan PPn. Dengan adanya *tax holiday*, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan dapat menurunkan biaya jasa mereka. Sehingga mampu menjangkau semua kalangan pelajar dan mahasiswa.

#### 2) Sektor Ekspor

Pengenaan *tax holiday* pada perusahaan eksportir dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Sehingga neraca perdagangan Indonesia mampu tumbuh positif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dengan ekspor yang tinggi, nilai tukar rupiah dapat dikontrol dan tidak terus melemah seperti yang terjadi sekarang. Namun pastinya akan muncul *trade-off* antara penerimaan pajak dengan kuantitas ekspor nasional.

### Agenda 3: Distribution

#### 1) Redistribusi Pendapatan

Salah satu indikator pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui *fiscus* harus melakukan redistribusi pendapatan secara vertikal. Redistribusi pendapatan berkaitan dengan pemungutan pajak secara progresif bagi kelompok ekonomi mampu. Selain pajak progresif, sumber redistribusi lain juga dapat dikenakan pada kalangan mampu melalui PPnBM. Sehingga terjadi subsidi silang antara kelompok ekonomi mampu dengan tidak mampu. Hasil pungutan pajak nantinya dapat didistribusikan kepada kelompok tidak mampu dan miskin melalui subsidi, bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha melalui K/L terkait.

#### 2) Pemerataan Pembangunan

Penerimaan negara yang diperoleh wajib digunakan untuk pemerataan pembangunan. Terlebih indeks pembangunan inklusif di Indonesia yang hanya pada poin 4,29. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur dan layanan dasar harus menjadi fokus utama ketimbang pembangunan yang bersifat eksklusif pada daerah dengan perekonomian baik. Dengan pemerataan pembangunan yang baik, diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pengentasan kemiskinan hingga 0%.

### KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya dilihat dari segi presentase kuantitasnya, tetapi juga dari segi kualitasnya. Perekonomi berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil yakni pada sektor perpajakan. Oleh karena itu, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan sektor perpajakan. Framework dari kebijakan ini terdiri dari tiga agenda yakni; regulation, incentive, dan distribution. Agenda distribution terdiri dari retribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Agenda regulation berisi peningkatan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agenda incentive berupa pembelian *tax holiday* pada sektor inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Resiliensi Organisasi : Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 11(1), 143-148.
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2024, Mei 6). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q)*. Retrieved from Berita Resmi Statistik: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>
- BPS. (2024, Januari 24). *Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Asing Terhadap Rupiah di Bank Indonesia dan Harga Emas di Jakarta (Rupiah)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg0IzI=/kurs-tengah-beberapa-mata-uang-asing-terhadap-rupiah-di-bank-indonesia-dan-harga-emas-di-jakarta--rupiah-.html>
- BPS. (2024, Maret 14). *Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat bersih: ribu ton) 1996-2023*. Retrieved from Tabel Data Statistik BPS: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwMyMx/volume-ekspor-dan-impor-migas--berat-bersih-ribu-ton--1996-2023.html>
- Databoks. (2024, Februari 6). *10 Sektor Usaha dengan Kontribusi Terbesar terhadap PDB Indonesia (2023)*. Retrieved from Katadata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/inilah-10-sektor-utama-penopang-ekonomi-indonesia-pada-2023-industri-pengolahan-terbesar#:~:text=Tercatat%2C%20sektor%20usaha%20yang%20berkontribusi,terhadap%20PDB%20Indonesia%20tahun%20lalu.>
- Databoks Katadata. (2024, Maret 18). *Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index ASEAN Versi UNDP (2022)*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/18/indeks-pembangunan-manusia-asean-2022-indonesia-tak-menonjol>
- Databoks Katadata. (2024, Februari 6). *Komparasi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2023, Indonesia Masuk 3 Besar*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/komparasi-pertumbuhan-ekonomi-asean-2023-indonesia-masuk-3-besar>
- Firmansyah, A., & Khairunnisa, D. (2023). Dampak Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Engineering Statistics and Data Science Journal*, 1(2).
- IMF. (2023, December 1). *Middle East Conflict Risks Reshaping the Region's Economies*. Retrieved from IMF Blog: [imf.org/en/Blogs/Articles/2023/12/01/middle-east-conflict-risks-reshaping-the-regions-economies](https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/12/01/middle-east-conflict-risks-reshaping-the-regions-economies)
- IMF. (2024, April 16). *World Economic Outlook*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Kemendag. (2024). *Neraca Perdagangan Indonesia*. Retrieved from Satu Data Kemendag: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-indonesia>
- Kementerian PPN / Bappenas. (2019). *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Bappenas.

- Kominfo. (2023, Juli 20). *Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India*. Retrieved from G20 Indonesia 2022: <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.
- OilPrice.com. (2024). *Oil Price Charts*. Retrieved from <https://oilprice.com/oil-price-charts/>
- Prasetyo, E. (2008). The Quality of Growth : Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK*, 1(1).
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (2022). *Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Krisis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022*. Berkas DPR RI.
- Sakir, Zainul, Z. R., & Zulkifli. (2020). Faktor-faktor Penyebab Pelemahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Jurnal Kinerja*, 17(2), 165-171.
- Sianipar, Y. (2019). PENGARUH INFLASI, INVESTASI, NILAI TUKAR, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Karya Tulis Ilmiah FEB UB*. Retrieved from [https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6162/5415#:~:text=Variabel%20nilai%20tukar%20\(kurs\)%20berpengaruh,akan%20menyebabkan%20pertumbuhan%20ekonomi%20meningkat.](https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6162/5415#:~:text=Variabel%20nilai%20tukar%20(kurs)%20berpengaruh,akan%20menyebabkan%20pertumbuhan%20ekonomi%20meningkat.)
- Siregar, D. R., Ratnaningsih, S., & Nurochim. (2022). Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia. *Edunomia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 61-71.
- Statista. (2024, Juni 10). *Closing price of Brent, OPEC basket, and WTI crude oil at the beginning of each week from June 13, 2022 to June 10, 2024*. Retrieved from Statista Data: <https://www.statista.com/statistics/326017/weekly-crude-oil-prices/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 340-350.
- UNDP. (2023). *Human Development Reports*. Retrieved from <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks>
- World Bank. (2024). *Gini Index Indonesia*. Retrieved from Data World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ID>